

MEMBANGUN KARAKTER MASYARAKAT BANGSA BERBASIS TEOLOGI GERAKAN SPRITUALITAS BARU

T. Safir Iskandar

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh, Indonesia

Email: safir.iskandarwijaya@gmail.com

Diterima tgl. 05-05-2014, disetujui tgl 23-06-2014

Abstract: The ideas for change can not be separated from the culture and civilization that originated from the paradigm that produces new creativities when faced with social stagnation. To solve the social problems, the sociological imagination ideas that exist and develop in the society should be incorporated so that they become a theological value system from the personal integrity of a community of nation. It is now the time for social imagination, as an idea, to be raised by an awareness to create and stimulate various changes in collective articulated discourses that deny the realities of social inequality established by the hegemony of any interests in the form of weakening the integrity of the nation in the name of the state. Theologically, for a successful and sustainable development of the nation there are six things to be considered: first, put the truth as the purpose of life. Second, the community of nations should not be restrained or restrain themselves both in thought and in social expression to the extent not contrary to the universal values. Third, justice must be incorporated into all aspects of society. Fourth, education must be provided to everyone. Fifth, critical thinking must be nurtured to respond to everything that goes into the community of nation both from within and from outside. And the last is the consistency and sincerity, dependability and sustainability of the five points mentioned above.

Abstrak: Gagasan untuk melakukan perubahan tak bisa lepas dari budaya dan peradaban yang berawal dari paradigma menciptakan kreativitas baru ketika dihadapkan pada kejumudan sosial. Untuk menyelesaikan permasalahan sosial perlu memadukan gagasan imajinasi sosiologis yang ada dan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat bangsa sehingga menjadi tatanan nilai teologis dari integritas kepribadiannya sebuah masyarakat bangsa. Imajinasi sosial, sebagai gagasan sudah saatnya dihidupkan oleh kesadaran untuk menciptakan dan menggerakkan berbagai perubahan wacana artikulasi kolektif yang menafikan berbagai realitas ketimpangan sosial yang dikonstruksi oleh hegemoni kepentingan apa dan siapapun dalam wujud pelemahan integritas bangsa atas nama negara menjadi perhatian yang serius. Secara teologis maka untuk kelangsungan pembangunan masyarakat bangsa ada enam hal untuk suksesnya pembangunan yang dimaksud, yaitu: *Pertama*, meletakkan kebenaran sebagai tujuan hidup. *Kedua*, maka masyarakat bangsa tidak boleh dikekang maupun mengekang diri, baik dari segi pemikiran maupun ekspresinya dalam bermasyarakat, selama tidak bertentangan dengan nilai universal. *Ketiga*, keadilan harus diwujudkan ke dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat bangsa. *Keempat*, memberikan pendidikan sungguhpun bukan hak segala-galanya. *Kelima*, sikap kritis ditumbuhkan untuk merespons segala hal yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat bangsa dari “dalam maupun luar” dirinya. Dan *terakhir*, adalah konsistensi dan keikhlasan, keteguhan dan keberlanjutan terhadap lima hal di atas.

Keywords: masyarakat, teologi, spiritualitas, perubahan

Pendahuluan

Doktrin tentang manusia sebagai makhluk tunggal yang diberi amanah memakmurkan bumi dengan segala isinya ditemui pada semua konsep agama. Dengan meminggirkan dikotomi agama ardi dan samawi, maka apapun risalah untuk kemanusiaan telah mentahbiskan umat manusia sebagai subyek sekaligus obyek pencerahan semua agama. Semua agama memiliki misi sekaligus konsep untuk menyebarkan ajaran-ajarannya kepada semua manusia; tanpa memandang sekat-sekat dan diskriminasi suku, ras, bangsa. Dibalik heterogenitas agama-agama di dunia, nilai-nilai etik kemanusiaan diharapkan menjadi perekat universal.¹ Salah satu nilai dasarnya adalah keadilan dan keadilan² sendiri menjadi sandaran teologis bagi semua agama.

Terminologi “Membangun Karakter³ Berbasis Teologis dan Spritualitas” merupakan sebuah imajinasi yang mengacu pada beberapa karakteristik dasar dalam proses pembangunan sosial, yaitu potensi, kelebihan dan keajaiban, kekuatan tertentu, dan keindahan yang dimiliki oleh suatu komunitas sosial.

Bagaimanapun sebuah imajinasi bertumbuh dan mekar dalam lembaran harapan manusia untuk menyingkap dimensi kreativitas dan wilayah-wilayah kemungkinan yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, imajinasi merupakan bentuk minimalis konsep realitas masa depan yang belum tersentuh oleh rekayasa perencanaan membangun dan merubah suatu tatanan sosial.

Dalam hubungan ini, Katrechko menyatakan bahwa imajinasi adalah landasan fundamental daya kesadaran yang tumbuh dan hidup dalam sebuah realitas. Karenanya, imajinasi mempunyai peran mendasar dalam menyokong aktivitas-aktivitas penyadaran sekaligus ikut mempengaruhi kesadaran dan kekuatan lain yang dimiliki oleh setiap

¹ Banding dan Lihat . Hans Kung, *The Global Ethics*, 1999.

² Keadilan merupakan ukuran tertinggi suatu masyarakat.”katakanlah: Tuhanku memerintahkan supaya kamu dapat berbuat adil” (Alquran 7:29), dan menurut Alquran taqwa tidak dapat dilepaskan atau dekat dengan keadilan ” Berlakulah adil, dan iti lebih dekat pada taqwa” QS.5:8. Konsep keadilan itu sendiri meliputi seluruh kebajikan dan mencirikan keharmonisan sempurna yang mendapat dukungan dari perilaku dan moral teladan. Untuk tujuan analisis rasional, para filosof klasik, pasca Aristoteles, lebih suka menekankan referensi istilah tersebut kepada kebajikan khusus, yang membedakan misalnya, antara keadilan dan persamaan atau antara keadilan dan kebaikan.

³ Istilah “karakter” berarti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain: tabiat, watak. Dalam istilah Inggris, karakter berpadanan dengan “character” yang dapat diartikan: 1. *All the qualities and features that make a person, groups of people, and places different from others* (semua baik kualitas maupun ciri-ciri yang membuat seseorang, kelompok orang atau tempat berbeda dari yang lain); 2. *the way the something is, or a particular quality or peature that a thing, an event or a place has* (cara yang khas atau kekhasan yang dimiliki oleh sesuatu, peristiwa atau tempat); 3. *strong personal qualities such as the ability to deal with difficult or dangerous situations* (kualitas pribadi yang tangguh misalnya kemampuan dalam menghadapi situasi yang sulit atau berbahaya); 4. *the interesting or unusual quality that a place or a person has* (kualitas menarik dan luar biasa yang dimiliki suatu tempat atau orang); 5. *a person, particularly an unpleasant or strange one* (orang yang aneh atau tidak menyenangkan); 6. *an interesting or unusual person* (orang yang menarik dan luar biasa); 7. *the opinion the people have of you, particularly of whether you can be trusted or relied on* (pendapat khalayak tentang anda, apakah anda dapat dipercaya). Dari penjelasan konsep karakter di atas, maka karakter pada nomor (5) dan (6) lebih bersifat informal sedangkan nomor 7. mengandung pengertian yang lebih bersifat formal. (Oxford Advace Learner’s Dictionary of Current English, 2000).

manusia. Karnanya, kesadaran imajinatif tersebut akan dan termanifestasi dalam kajian rasionalitas⁴

Dalam hubungan dengan imajinasi sebagai kekuatan yang ada pada manusia, maka ada yang disebut dengan imajinasi sosiologis; Dalam kaitan tersebut C. Mills, memberikan ulasan bahwa imajinasi sosiologis merupakan potensi untuk menggerakkan sensitivitas masyarakat bangsa untuk menemukan keterhubungan antara persoalan-persoalan yang bersifat pribadi dan isu-isu publik dalam struktur sosial.

Adapun yang menjadi catatan adalah apapun bentuk kesusahan dan kesukaran pribadi yang biasanya bersifat lokal dan temporal adalah suatu hal lain bila dikaitkan dengan isu-isu public dalam tatanan kehidupan masyarakat bangsa, dan hal yang bersifat pribadi bukan suatu yang harus digeneralkan sebagai indikator yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat bangsa. Lebih lanjut dikatakannya bahwa ketimpangan dan kesukaran sosial dapat ditemukan dalam karakter individu dan dalam tata relasi-relasinya dengan yang lain. Dalam konteks temporal, kesukaran individu merupakan pribadi ataupun lingkungan sosial itu sendiri. Secara kontras, kiranya dapat dikatakan bahwa isu-isu sosial bersifat impersonal, struktural, institusional, dan dia merupakan proses perjalanan perubahan integritas atau kepribadian sebuah masyarakat bangsa. Sungguh bagaimanapun, beban isu-isu publik tetap akan melampaui batas kemampuan serta kekuatan setiap individu untuk merubahnya, untuk ini berbagai upaya untuk mengadvokasinya diperlukan dan berbagai aksi-aksi kolektif atau gerakan sosial juga menentukan arah dan kemana kepribadian sebuah masyarakat bangsa dibawa dan terlihat kepermukaan. Tentunya, hal ini jauh dan bahkan mungkin sangat berbeda dengan cara dan gaya penyelesaian kekeliruan individual yang dilakukan melalui langkah-langkah politik.⁵

Oleh karena itu, dalam wacana teori kritik, konsepsi politik harus dipahami secara berbeda pada setiap gerakan yang lahir pada suatu masyarakat bangsa untuk membangun kepribadian dan integritasnya dan hal semacam ini tetap dan akan berjalan dan sesuai dengan kualitas integritas dan kepribadian yang akan dibangun; dan dia juga merupakan wujud manifestasi berbagai relasi kekuasaan pada semua level interaksi sosial, sehingga kadang-kadang tindakan subjektivitas seseorang senantiasa berada dalam relasi-relasi kepentingan bisa saja menjadi landasan pengetahuan dan kekuasaan untuk membangun relasi yang mutual dalam kerangka membangun integritas sebuah masyarakat bangsa. Relasi politis berbagai kelompok juga merupakan manifestasi dan apresiasi suatu kepentingan untuk melakukan pemihakan kepada kelompok dan individu masyarakat terpinggirkan (*mustadh`afin*) dalam tataran obyek yang member pengaruh sekaligus memperkeruh tatanan kepribadian sekaligus jatidiri dan integritas suatu masyarakat bangsa. Sebuah kelompok masyarakat yang ter subordinat atau termarjinalkan juga memiliki hak-hak sipil dan politik sungguhpun terkait dengan otentisitas budaya lokal (ras dan etnis) serta identitas kultur agama. Di samping itu, juga ada ciri khas yang menonjol dalam kerangka membangun integritas sebuah masyarakat bangsa adalah tumbuh wacana

⁴ Katrechko, *Imagination as fundamental faculty of consciousness*, <http://www.philosophy.ru/libray/ksl/kate007.htm>.

⁵ Austin, *Time Line Assignment: The Intersection of Biography and History*, <http://www.uwgb.edu/Austin/course/rm/imagination.htm>.

tanding dan resistensi kritis, baik dalam bentuk gerakan intelektual maupun praksis emansipatoris. Pertanyaannya adalah bagaimana Membangun Karakter Masyarakat Bangsa yang berbasis teologi sebagai Gerakan Spritualitas.

Gagasan Melakukan Perubahan

Gagasan untuk melakukan perubahan tak bisa lepas dari budaya dan peradaban yang berawal dari paradigma menciptakan kreativitas baru ketika dihadapkan pada kejumudan sosial. Karenanya gerakan-gerakan kontra hegemoni yang tumbuh dan muncul, sungguh bagaimanapun, terkait erat dengan gerakan imajinasi sosial guna mewujudkan nilai kepribadian dan integritas dirinya. Di sisi lain, ideologi, sebagai pandangan teologis yang menjadi panutan juga merupakan landasannya sebagai salah satu pilar kekuatan sebuah komunitas masyarakat bangsa untuk merevolusi diri untuk membangun integritasnya, sehingga ia tetap berada di dalam gerakan menggugat berbagai kemapanan yang terselubung oleh dan dari berbagai kesalahan individual sekaligus kekeliruan sosial.⁶

Pertanyaan yang timbul adalah apa yang perlu dilakukan dan bagaimana cara menyelesaikan problema membangun karakter sosial berbasis teologis. Paling kurang jawabannya adalah memadukan gagasan imajinasi sosiologis yang ada dan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat bangsa sehingga menjadi tatanan nilai teologis dari integritas kepribadiannya sebuah masyarakat bangsa. Kiranya kini yang dapat dilakukan adalah melalui wacana membangun konstalasi imajinasi peradaban global.

Memang, realitas politik dan kondisi sosial masyarakat terlihat dalam ketidakadilan, kemiskinan, di samping sikap otoritarian politik yang tak seimbang sekaligus diskriminatif telah berakar pada tekanan struktural birokrasi dan ideologi aparatur merupakan referensi historis dalam memaknai kepentingan ideology yang dijadikan landasan teologis untuk membangun sebuah integritas bangsa yang sejalan kebutuhannya.

Dengan kata lain bahwa gagasan intelektual yang melampaui kebekuan normatif dan moral teks perlu dilakukan pemaknaan yang konprehensif dan kontekstual guna membangun integritas suatu masyarakat bangsa. Karenanya, sungguh ketidakadilan dan berbagai ketimpangan sebagai fenomena sosial merupakan bagian penting menumbuhkan pemahaman realitas kehidupan suatu masyarakat bangsa yang tak memiliki integritasnya.

Kondisi ini dapat terlihat dari berbagai sebutan yang naif sungguhpun baik dalam pendengaran, seperti sebutan “rahmat” di timur tengah terhadap wanita Indonesia sebagai tenaga kerja dan juga istilah “indon” di negeri seberang terhadap sebuah masyarakat bangsa yang dipandang rendah dan tidak memiliki integritas keperibadiannya.

Imajinasi sosial, sebagai gagasan sudah saatnya perlu dihidupkan oleh kesadaran untuk menciptakan dan menggerakkan berbagai perubahan wacana artikulasi kolektif yang menafikan berbagai realitas ketimpangan sosial yang dikonstruksi oleh hegemoni kepentingan apa dan siapapun dalam wujud pelemahan integritas bangsa atas nama negara menjadi perhatian yang serius.

⁶ Bandingkan. Boullata, Dekonstruksi Tradisi (terj), (Yogyakarta: LKiS, 2001), ,165, www.movementofimagination.org.

Sungguh tradisi lintas budaya, komunikasi dan dialog menyantuni realitas perbedaan dan atas nama martabat dan budaya serta cita-cita ideal teologis sebuah tatanan kehidupan sosial bisa dilakukan melalui nilai-nilai universal di samping nilai spesifik sebuah masyarakat bangsa. Untuk itu, komunikasi adalah kunci memahami realitas dalam inter-koneksi budaya dan tradisi pada konteks pembumian nilai teologi keterbukaan, toleran dan menghargai dalam kebersamaan. Sistem nilai teologis itu semua bagaimanapun berada pada aras normatif yang harus bersifat universal; sedang pada realitas historis-sosiologis, ia harus ditampilkan dalam bahasa gaya hidup masyarakat bangsa sebagai simbol budayanya yang beragam dan partikular. Jika begitu halnya, maka ruang pertemuan, komunikasi dan dialog menjadi landasan etika sosial dalam mengapai cita-cita ideal-normatif teologis yang menjadi panutannya⁷ untuk membangun karakter masyarakat bangsa.

Bangunan karakter masyarakat bangsa yang berbasis teologis membutuhkan bangunan konsep multicultural; dan konsep ini sudah seharusnya menjadi bagian peradaban manusia. Multikulturalisme melingkupi pluralitas ras, etnik, jender, kelas, dan agama sampai pilihan gaya hidup. Kiranya inperasi ini merupskan nilai kepribadian bangsa.

Konsep semacam ini setidaknya bertumpu pada dua keyakinan; yaitu *Pertama*, secara sosial, semua kelompok budaya dapat direpresentasikan dan hidup berdampingan bersama. *Kedua*, diskriminasi dan rasisme dapat direduksi melalui citra positif keragaman etnik dan budaya lain. Untuk itu, wawasan tentang multikulturalisme perlu dikukuhkan dalam soal keberagaman.

Titik Teologis Kritisasi Membangun Integritas.

Diskursus teologis, sebagai sebuah landasan ideologis merupakan salah satu tema sentral dalam perdebatan studi-studi filsafat, sejarah, sosial, politik, bahkan dalam perkembangan kontemporer. Teologi, sebagai ideologi menjadi unsur dominan dalam studi budaya. Secara geneologis, studi teologi biasanya berangkat dari pembahasan konsep dan makna teologi itu sendiri. Teologi dan dalam substansinya apapun adalah tuntutan ideologis, baik dari sebuah masyarakat bangsa dan maupun oleh suatu aliran mazhab.⁸ Keduanya dapat dipandang sebagai suau yang memiliki potensi dan kontribusi dalam rangka menginspirasi sekaligus menyelesaikan berbagai konsep dan ideologi untuk membangun karakter suatu masyarakat.

Kiranya dalam kaitan ini, Douglas Kellner menyampaikan bahwa Frederick Engels, sahabat Karl Marx, adalah orang yang pertama kali memfokuskan perhatian pada tumbuhnya berbagai perbedaan antara masyarakat pra modern dan modern serta peran

⁷Bandingkan. Silfia Hanani, *Membangun Kesejahteraan Sosial Berbasis Teologi Keadilan Islam dalam Meningkatkan Harkat dan Martabat Kemanusiaan Pahlawan Devisa Dalam Lintas Negara Dan Globalisasi*, The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) Surakarta, 2 - 5 November 2009. Dari http://dualmode.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/Silfia_Hanani.pdf dan *Suhermanto Jakfar*, HAM, Kekuasaan, dan Teologi Keadilan, (<http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962bdca35787f2d1e8d4b1a7274496fdcea>)

⁸Williams F. O` Neil, *Ideologi-Ideologi Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2001., 31.

formatif kapitalisme dalam menciptakan dunia modern baru⁹ sebagai sebuah perdebatan membangun jati diri suatu masyarakat bangsa.

Melalui karyanya yang bertajuk *German Ideology*, Marx dan Engels mengemukakan bahwa ideologi sebagai suatu tolok ukur yang dijadikan panutan suatu masyarakat bangsa, pada dasarnya adalah kesadaran yang menyembunyikan hubungan riil berbagai orang dengan dunianya. Kini berbagai ideologi telah tersebar dan banyak dijadikan panutan oleh suatu masyarakat, yang bagaimanapun bentuknya telah mencerminkan kepentingan dan keinginan dominasi kelas-kelas sosial.¹⁰ Dengan kata lain, ideologi, jika difahami sebagai landasan teologis bangunan masyarakat bangsa maka ia telah merepresentasikan realitas kesadaran baru yang menutupi realitas teologis sebelumnya seperti yang sebenarnya, yaitu eksploitasi, kekerasan dan penindasan, dari kelas dan golongan.

Dalam pada itu, studi ideologi sebagai suatu bangunan teologi bangsa mulai mendapat tempat penting pada kehidupan budaya. Umpamanya, ketika kapitalisme berada pada posisi terdepan dalam mengembangkan sistem ekonomi yang eksploitatif dan membangun relasi-relasi sosial yang hegemonik. Nyatanya di balik itu ada tesis lain yang juga bisa saling berbeda ataupun saling mendukung yang selalu dijadikan rujukan oleh generasi selanjutnya.

Bagaimanapun, proses transisi masyarakat berideologi kapitalisme ke sosialisme, paling kurang ada beberapa syarat utama bagi sebuah tatanan politik sosial-kaum pekerja, yaitu: Pertama, pemilihan umum yang bebas dan demokratis dengan hak recall terhadap semua pejabat; Kedua, tidak ada pejabat yang pantas menerima gaji yang lebih tinggi daripada seorang pekerja yang ahli; Ketiga, tidak ada tentara yang berjaga kecuali rakyat yang dipersenjatai; keempat, secara bertahap, semua tugas menjalankan negara harus dilakukan oleh massa di atas basis yang bergilir.

Kiranya dengan basis di atas masyarakat dapat bergerak untuk melakukan revolusi kolektif dan hal semacam ini kiranya belum dan tidak terlintas dalam benak pengusung ideologi sosialisme ini, dimana kelas pekerja muncul sebagai kekuatan baru dengan berbagai varian ideologi baru mereka pula.

Sungguh bagaimana ideologi sosialisme sebagai ideologi alternative belum sepenuhnya bisa menggantikan ideologi kapitalisme. Fukuyama memberkan ulasan bahwa ada beberapa variabel lain yang membuat kemenangan ideologi kapitalisme melalui demokrasi liberalnya atas sosialisme dan komunisme, yaitu: runtuh sosialisme sebagai ideologi alternatif, bangkrut negara-negara komunisme, tidak terbuktinya tesis bahwa kelas pekerja merupakan kekuatan inti politik perubahan sosialisme komunisme, dan muncul gerakan sosial yang mengusung isu-isu sosial minoritas yang justru diabaikan. Kiranya, variabel terakhir telah menjadi cikal bakal tumbuhnya berbagai ideologi perlawanan lokalitas dan berbasis solidaritas sosial, yang sering disebut gerakan sosial baru, dimana Habermas dan Alan Tourine menyebutnya *new sosial movement*.

Perkembangan selanjutnya, ideologi sering diabstraksikan sebagai asumsi yang berbeda, bahkan sebagian besar pemikir telah melakukan dekonstruksi konsep sosialisme,

⁹Douglas Kellner, *Teori Sosial Radikal* (Yogyakarta: Syarikat, 2003), 57-58.

¹⁰Ania Loomba, *Kolonialisme dan Pascakolonialisme* (Yogyakarta: Benteng, 2003), 33.

seperti yang dilakukan Ernesto Laclau dan Mouffe. Diskursus semacam ini telah mendorong sebuah masyarakat bangsa untuk memasuki “aras baru”, dimana kebaruan itu tampak dari dekonsentrasi konsep ideologi dan perluasan wilayah ideologi melalui sistem pengetahuan yang memproduksi kebenaran. Secara garis besar, tesis tersebut dapat disimpulkan ke dalam sebuah pernyataan dimana ideologi terkait erat dengan hegemoni, power dan knowledge; dan studi ideologi, hegemoni, power, dan knowledge inilah yang melahirkan studi humaniora baru, dalam wujud *cultural studies*;¹¹ Jadi, ideologi akan sangat terikat pada budaya dan kekuatan sebagaimana termanifestasi dalam budaya massa.

Oleh karenanya, gerakan sosial baru merupakan alternatif gerakan sosial yang mencakup gerakan perempuan, gerakan masyarakat kulit berwarna, gerakan sosial poskolonial, gerakan lingkungan, gerakan nuklir, dan gerakan pembebasan nasional.¹² yang sekaligus mengakomodasi keragaman gerakan perlawanan terhadap dominasi yang dilakukan oleh lokal. Dimana, gerakan sosial harus ditempatkan pada posisi dan peran gerakan resistensi melawan dominasi sistemik yang bersifat praktis. Bagaimanapun kekuatan yang berpihak pada keadilan sosial, selalu berada dalam fram spirit ideologi dan teologi perubahan. Dan ini semua merupakan karakter yang tumbuh dalam kehidupan sebuah masyarakat bangsa. Selanjutnya Pertanyaan yang timbul adalah Bagaimana mekanisme pembentukan Karakter Bangsa sebagai spririt teologisnya.

Teologi Landasan Pembentukan Karakter.

Persoalan teologi dan keyakinan adalah nilai agama yang tidak dapat dipisahkan dari persoalan kehidupan apapun komunitas yang tumbuh dalam sebuah bangsa, apalagi terkait dengan kekuasaan dan kemasyarakatan.. Agama dan keyakinan berperan sebagai alat pengikat antar satu individu dengan lainnya dan bahkan pengikat antar berbagai komunitas yang ada, di samping itu dalam waktu lain keyakinan teologis juga menjadi media disintegratif. Justeru itu, agama dan keyakinan sudah seharusnya dipahami sebagai kerangka nilai, bukan menjadi narasi teks ataupun simbol yang kaku dan serampangan yang memudahkan memicu perpecahan kehidupan bangsa. Dalam pada itu kehadirannya pun harus menjadi kerangka moral ketahanan sosial, politik, budaya dan agama sendiri, dan bukan dalam kerangka membuat kotak korak pemisah antar masyarakat bangsa. Di akhir abad kedua puluh keberadaan agama dan pemahaman agama yang dijadikan sebagai ideologi untuk membangun integritas masyarakat bangsa lebih menempatkan dirinya sebagai pemicu konflik.

Kamaruddin Hidayat mengatakan bahwa persoalan agama, moralitas kekuasaan dan masyarakat madani adalah persoalan manusia dan kemanusiaan. Adapun letak letak perbedaannya adalah; agama merupakan respons manusia terhadap Tuhannya dan kepercayaannya, sedangkan kekuasaan dan masyarakat madani merupakan respons dan tatakrama manusia sebagai makhluk sosial dalam konteks pergumulan dengan

¹¹*Ibid.*, 65.

¹²Ben Agger, *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasinya* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), 146.

sesamanya.¹³ Sebagai makhluk sosial yang beragama, manusia diharapkan bisa bertindak netral dan bersikap objektif. Sebagai agamawan, seharusnya tidak membiarkan dirinya berperilaku secara destruktif. Tetapi sebaliknya, sebagai agamawan harus menunjukkan citranya sebagai pelaku kekuasaan yang memiliki kesadaran moral dan etis yang lahir dari spirit keagamaan.

Dalam pada itu, agama sebagai keyakinan juga merupakan sumber pertama dan utama bagi para pemeluknya. Karena, melalui agama, mereka menyebarkan nilai-nilai untuk diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sungguh bagaimanapun agama menjadi apresiatif bagi pembangunan karakter bangsa dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: Pertama, memelihara unsur-unsur nilai atau norma yang sudah mapan dan positif. Kedua, menghilangkan unsur-unsur nilai dan norma yang sudah mapan tetapi negatif. Ketiga, menumbuhkan unsur-unsur nilai dan norma baru yang belum ada dan dianggap positif. Keempat, bersifat menerima (receptive), memilih (selective), mencerna (digestive), menggabung-gabungkan dalam satu sistem (assimilative), dan menyampaikan pada orang lain (transmissive) terhadap nilai pada umumnya. Kelima, bersifat rekonstruktif penyucian nilai, agar sesuai dan sejalan dengan nilai agama sendiri. Dengan demikian, akan terwujud hubungan yang ideal antara nilai agama dan nilai masyarakat.¹⁴

Kiranya dalam hubungan ini pandangan Nurcholis Madjid kini diperlukan pandangan terhadap agama dan keyakinan al-hanifiyat al-samhah, sebagai pandangan yang tidak terkotak dalam wujud komunalisme atau bentuk yang cenderung mengurung diri pada struktural tertentu. Pemahaman keagamaan semacam ini, seseorang akan dengan sendirinya terpenggil untuk berpartisipasi pada agenda-agenda kegiatan besar dan luas yang bermanfaat pada semua golongan manusia. Dan salah satu agenda kegiatan besar yang tampak adalah pada tercapainya cita-cita universal itu sebagai awal penciptaan keadilan dan kermanusiaan di dalam kacamata ideologi politis sebuah masyarakat bangsa. Ajaran demikian, artinya adalah menitikberatkan inklusifitas agenda-agenda universal di atas.¹⁵ Dan secara sederhana agama dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu agama sebagai simbol atau lembaga, dan agama sebagai sistem nilai.¹⁶

Meletakkan konsep pembangunan sebuah masyarakat bangsa berkarakter atas landasan teologis sebagai suatu sudut pandang maka tentunya harus memperhatikan beberapa hal yang terkait, yaitu. Pertama, landasan teologis kiranya mendorong untuk tidak

¹³Kamaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas Moralitas Agama dan Krisis Modernitas*, (Jakarta: Paramadina1998), 9.

¹⁴Bandingkan dan Lihat. M.I Soelaeman, *Manusia-Religi dan Pendidikan*,(Jakarta: Dirjen PTPPLPTK, , 1988), 161 dan Endang Saifuddin, , *Agama dan Kebudayaan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), 73.

¹⁵Lihat. Fachry Ali, dalam Pengantar Nurcholish, Madjid, *Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, (Jakarta:Paramadina, 1998), xlv-xlvi

¹⁶Islam, secara sederhana dapat dipahami dalam dua hal, sistem nilai dan lembaga. Dan Islam sebagai sistem nilai tentu berbeda jauh dengan Islam yang dipahami sebagai lembaga. Kekeliruan yang telah dilakukan oleh sebagian masyarakat dalam memahami Islam selama ini adalah Islam sebagai lembaga dan dimaknai sebagai Islam itu sendiri. Jika Islam hanya dimaknai seperti itu, maka Islam sama halnya dengan berbagai lembaga dan mazhab yang ada, seperti Islam Sunni, Islam Sii, Islam Salafi, Islam Liberal, Islam Rasional di samping Islam Muhammadiyah, Islam Nahdhatul Ulama, Islam Persis, Islam Ahmadiyah, Islam LDII, dan berbagai Islam lembaga lain dan menjadi panutan sekaligus fanatisme masyarakat selama ini. sebagai salah satu bagian di dalamnya. Islam menjadi sangat sempit dan tidak lagi universal, Islam seperti itu juga bukan Islam yang menjadi rahmat bagi alam semesta.

memunculkan klaim terhadap satu satunya pemahaman dan model pembenaran, karena teologis sebagai konsep dasar pembangunan tetap memiliki sifat universal dan holistik. Karena, klaim pembenaran atas satu-satunya teologis berdasarkan aliran dan pemahaman justru mempersempit keluasan makna dan cakupan konsep teologis itu sendiri. Kedua, pandangan yang ada nanti akan lebih bersifat relatif dan terbuka untuk selalu bisa didialogkan dalam rangka menemukan pemahaman yang lebih mendekati kebenaran terhadap pembangunan karakter ideal masyarakat.

Dalam kaitan ini, kiranya pemikiran Nurchhlish Madjid layak dan pantas dijadikan tolok pandang untuk mengatakan bahwa untuk membangun sebuah masyarakat bangsa memiliki karakter ideal diperlukan tatanan dasarnya, yaitu tumbuhnya masyarakat yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, masyarakat tauhid, di dalamnya terdapat keadilan sosial bagi seluruh rakyat; di samping hidupnya saling menghargai dan menghormati serta berwujud dalam sikap maupun pemikiran yang mencerminkan nilai kebenaran universal.¹⁷

Dalam pada itu, untuk membangun masyarakat berkarakter ideal tak luput dari berbagai tantangan yang harus dihadapinya dan cukup serius. Di samping permasalahan nilai dan ideologi yang menjadi panutannya, sekaligus berimplikasi terhadap lahir kecenderungan baru dan menurun semangat sekaligus etos masyarakat. Hal tersebut bisa saja menjadikan masyarakat bangsa semakin melemah etos dan semangat di hampir seluruh aspek kehidupan,¹⁸ baik dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.

Sudah seharusnya teologi dalam hal ini difahami sebagai nilai yang bersifat universal. Jikalau sebuah masyarakat bangsa tidak memahaminya secara benar dalam aktualisasinya, justru nilai dasar itu sendiri yang menjerumuskan masyarakat bangsa kepada sikap dan perilaku yang bertentangan dengan nilai teologis yang menjadi panutannya itu sendiri. Oleh karena itu, muncul konflik antar agama, konflik antar etnis, bahkan konflik di dalam satu agama atau etnis, yang telah menghabiskan waktu dan tenaga serta fikiran tidak lain disebabkan salah satunya oleh kurangnya pemahaman terhadap nilai yang dijadikan landasan kehidupan yang bersifat universal. Dalam pada itu, tidak ada komitmen dalam pelaksanaan nilai tersebut juga menjadi pemicu berat lainnya. Pertanyaannya adalah bagaimana masyarakat bangsa akan bersatu dan kuat sebagai wujud dari suatu masyarakat yang ideal, jika sebuah nilai, baik pada ranah pemahamannya maupun realitas perbedaan tidak disikapi secara benar.

Di sisi lain yang harus menjadi catatan adalah bahwa di saat masyarakat bangsa belum siap menghadapi situasi tersebut, maka krisis sosial juga tidak dapat dielakkan. Kiranya krisis moral dan etika, yang sebelumnya adalah landasan luhur dalam bermasyarakat, semakin terkikis oleh terpaan semangat dan etos lain yang mendominasi. Sekarang, bagaimanapun norma yang dimiliki sebuah masyarakat bangsa mulai berubah.

¹⁷ Bandingkan. Nurcholis Madjid, *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 2008), 149-186; dan Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), lihat juga karangan lain karya Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1991).

¹⁸ Lihat dan Bandingkan. Deliar Noer, *Ideologi, Politik dan Pembangunan*, (Jakarta: LPPM Tan Malaka, 2007) dan Tarmizi Taher, *Agenda Kritis Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 84-95.

Sebagai contohnya adalah ada sejumlah anak telah berani melawan dan bahkan membunuh orang tua, ada sejumlah sahabat menjadi pengkhianat, dan berbagai tindak kejahatan yang merugikan orang lain. Dalam sisi lain, juga ada masyarakat bangsa menjadi masyarakat individualistis, konsumoris, materialistis, bahkan sampai menjadi hedonis.¹⁹

Secara teologis maka untuk kelangsungan pembangunan masyarakat bangsa harus dipahami sedikitnya ada enam hal untuk suksesnya pembangunan yang dimaksud, yaitu: *Pertama*, meletakkan kebenaran sebagai tujuan hidup. Masyarakat bangsa harus mulai untuk berani meniadakan segala bentuk kepercayaan atau orientasi selain kepada kebenaran, karena ia merupakan asal dan tujuan dari sebuah realitas,²⁰ *Kedua*, untuk mencapai kebenaran sebagai tujuan hidup, maka masyarakat bangsa tidak boleh dikekang maupun mengekang diri, baik dari segi pemikiran maupun ekspresinya dalam bermasyarakat,²¹ selama tidak bertentangan dengan nilai universal. *Ketiga*, keadilan harus diwujudkan ke dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat bangsa, karena keadilan adalah, nilai yang melahirkan persamaan dalam maknanya yang luas, misalnya persamaan derajat, juga penempatan pada posisinya yang tepat apa yang merupakan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat sekaligus menghilangkan diskriminasi karena ia menghambat terwujudnya keadilan itu sendiri. *Keempat*, memberikan pendidikan sungguhpun bukan hak segala-galanya, tanpa pendidikan akan mengalami banyak kesulitan. Karenanya, pendidikan harus mulai lebih diutamakan sebagai proses sekaligus bekal dalam menjalani keberlangsungan kehidupan masyarakat bangsa. *Kelima*, sikap kritis ditumbuhkan untuk merespons segala hal yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat bangsa dari “dalam maupun luar” dirinya. Karena sikap kritis dibutuhkan sebagai penyaring sekaligus sebagai bentuk kesadaran masyarakat bangsa berhadapan dengan gejala dan realitas sosial. Dan *terakhir*, adalah konsistensi dan keikhlasan, keteguhan dan keberlanjutan terhadap lima hal di atas.

Oleh karena itu, dibutuhkan keikhlasan dalam segala hal dalam berfikir dan bertindak. Karenanya, negara sebagai bangsa harus memiliki karakter identitas dirinya. Jika tidak ada, maka pengkhianatanlah yang berlangsung terhadap kesetiaan rakyat; dan kondisi semacam ini akan mudah dieksploitasi untuk kepentingan penguasa, baik tingkat penguasa formal struktural, maupun penguasa non-formal.

Sebagai sebuah catatan bahwa cara pandang keber-agama-an bagi bangsa yang punya karakter tidak akan menimbulkan kekerasan apalagi penindasan. Pemikiran semacam ini bukanlah suatu yang ditakutkan dan dianggap membawa ajaran sekularisme, justru yang ingin didampaikan adalah fundamentalisasi agama terhadap Negara bukanlah suatu yang tak wajar. Agama dan Negara sudah menyatu, manunggal. Pandangan agama sudah menjadi pandangan Negara. Penyimpangan terhadap Negara, berarti penyimpangan terhadap agama.²²

¹⁹Lihat dan Bandingkan. Tarmizi Taher, *Agenda Kritis Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 84-100.

²⁰Bandingkan. Nurcholil Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, (Jakarta: Paramadina, 1992).

²¹Lihat Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), 395 dan Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 55-56.

²²<http://filsafat.kompasiana.com/2012/08/22/national-character-building-481341.html>

Spirit ini juga perlu bersandarkan kepada beberapa hal berikut, yaitu: Pertama, Kemandirian, yang dalam istilah Presiden Soekarno disebut dengan “Berdikari” (berdiri di atas kaki sendiri); Kedua, Demokrasi (democracy), atau kedaulatan rakyat sebagai ganti system kolonialis. Masyarakat demokratis yang ingin dicapai adalah sebagai pengganti dari masyarakat warisan yang feodalistik. Ketiga, Persatuan Nasional (nation unity). Dalam konteks actual dewasa ini diwujudkan dengan kebutuhan untuk melakukan rekonsiliasi nasional antar berbagai kelompok yang pernah bertikai ataupun terhadap kelompok yang telah mengalami diskriminasi selama ini. Keempat, Martabat Internasional (bargaining position). Sikap menentang hegemoni suatu bangsa atas bangsa lainnya adalah sikap yang mendasari ide dasar nation and character building sebagai lawan atas segala bentuk penghisapan suatu bangsa terhadap bangsa lain, serta menentang segala bentuk neokolonialisme dan neoimperialisme.²³

Sungguh bagaimanapun membangun dan mempertahankan integritas masyarakat bangsa adalah *unfinished agenda*, agenda yang belum rampung. Melakukannya diperlukannya konsistensi, kesungguhan sekaligus kesabaran. Agar upaya pembinaan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah agar ia efektif dan berhasil, tetapi yang diperlukan pula adalah membangun tatanan, perangkat dan kebijakan yang tepat. Karenanya, yang diperlukan adalah upaya memperkuat integritas nasional yang didukung setidaknya oleh lima: *Pertama*, membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu; *Kedua*, menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus. Kompromi dan kesepakatan adalah jiwa musyawarah dan sesungguhnya juga jiwa demokrasi; *Ketiga*, membangun kelembagaan (pranata) yang berkarkan nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa; *Keempat*, merumuskan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam segala aspek kehidupan dan pembangunan bangsa, yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah dari dan untuk berbagai wilayah sesuai dengan kebutuhan. Dan *Kelima*, melakukan upaya bersama dan pembinaan integritas nasional memerlukan kemampuan dan kecakapan sekaligus pola kepemimpinan yang arif, bijak dan efektif.

Kesimpulan

Suatu kekuatan bangsa yang berakar dari bangsa itu sendiri menjadi identitas dan ciri bangsa sekaligus modal untuk membangun dirinya. Dalam kerangka penguatan jati diri bangsa sebagai landasan teologinya diperlukan beberapa hal, yaitu; Transendensi: Menyadari bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kesadaran ini juga berarti memahami keberadaan diri dan alam sekitarnya. Di sisi lain tumbuhnya sikap humanisasi dimana setiap anggota masyarakat bangsa pada hakekatnya setara di mata Tuhan dan manusia merupakan subjek yang memiliki potensi. Kebinekaan sebagai kesadaran ada sekian perbedaan adalah kudrat untuk menumbuhkan kekuatan. Wujudnya adalah pembebasan atas penindasan sesama manusia. Sungguh bagaimanapun kunci kesejahteraan adalah keadilan. Dan adil itu sendiri tidak berarti sama, tetapi proporsional.

²³<http://angga17kireina.wordpress.com/2011/09/26/nation-and-character-building/>

Karakter bangsa itu asendiri merupakan aspek penting dari kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Karena, ia merupakan faktor yang turut mendukung untuk menentukan kemajuan suatu bangsa. Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini. Usia dini merupakan masa emas namun kritis bagi pembentukan karakter seseorang.

Adapun strategi dasarnya adalah sistem belajar seumur hidup, di samping membuat struktur pendidikan dapat mengikuti perubahan kontemporer, seperti internasionalisasi, dan pembangunan masyarakat yang berorientasi informasi dan teknologi, dan mengembangkan individu dengan nilai positif seperti; suka bekerja keras, rajin, loyal, ulet kreatif, bertanggungjawab, jujur, dan sebagainya. Dalam pada itu, sudah seharusnya jatidiri tidak semata bersifat normatif, melainkan menjadi bagian dari *culture* yang menjadi *nilai-nilai bersama* yang dicita-citakan secara bersama.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agger, Ben. *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasinya*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hidayat, Kamaruddin. *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernitas*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Ibnu Khaldun. *Muqaddimah*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006.
- Kellner, Douglas. *Teori Sosial Radikal*. Yogyakarta: Syarikat, 2003.
- Kuntowijoyo. *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- _____. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1991.
- Katrehko, *Imagination as fundamental faculty of consciousness*, <http://www.philosophy.ru/libray/ksl/kate007.htm>.
- Loomba, Ania. *Kolonialisme dan Pascakolonialisme*. Yogyakarta: Bentang, 2003.
- Madjid, Nurcholish. *Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- _____. *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 2008.
- _____. *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*. Jakarta: Paramadina, 1992.
- Noer, Deliar. *Ideologi, Politik dan Pembangunan*. Jakarta: LPPM Tan Malaka, 2007.
- O'Neil, Williams F. *Ideologi-Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Saifuddin, Endang. *Agama dan Kebudayaan*. Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
- Soelaeman, M.I. *Manusia-Religi dan Pendidikan*. Jakarta: Dirjen PTPPLPTK, 1988.
- Taher, Tarmizi. *Agenda Kritis Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- <http://filsafat.kompasiana.com/2012/08/22/national-character-building-481341.html>
- <http://angga17kireina.wordpress.com/2011/09/26/nation-and-character-building/>